

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAMPUNG KB DI KABUPATEN TASIKMALAYA

Eva Sri Sugiarti R<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Program Pascasarjana STIA YPPT Priatim Tasikmalaya

\* [evasugiartie.part2@gmail.com](mailto:evasugiartie.part2@gmail.com)

---

### ABSTRAK

---

#### Kata kunci:

Implementasi kebijakan dan  
Kampung KB.

Program Kampung KB di Kabupaten Tasikmalaya tumbuh subur, namun demikian dari jumlah yang banyak hanya beberapa Kampung KB yang mampu berkembang dalam mencapai tujuan kebijakannya. Adapun yang menjadi penelitian ini yaitu implementasi kebijakan Kampung KB di Kabupaten Tasikmalaya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis secara mendalam faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam mencapai keberhasilan dari pelaksanaan program Kampung KB di Kabupaten Tasikmalaya. Metodologi penelitian yang digunakan termasuk jenis penelitian kualitatif, dengan tujuan menganalisis fenomena sosial yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan tentang Kampung KB di Kabupaten Tasikmalaya. Sumber data diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pejabat dan orang-orang yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan program Kampung KB. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan implementasi kebijakan Kampung KB oleh Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Tasikmalaya belum dapat mencapai tujuan. Faktor penghambat dalam mencapai keberhasilan program Kampung KB di Kabupaten Tasikmalaya diantaranya kurangnya partisipasi keluarga dan lingkungan masyarakat, serta dukungan sarana prasarana serta anggaran yang memadai untuk melaksanakan berbagai program yang termuat dalam Kampung KB.

---

### ABSTRACT

---

#### Key word:

Policy implementation and  
Family Planning Village

The Family Planning Village Program in Tasikmalaya Regency thrives, however, out of a large number, only a few Family Planning Villages are able to develop in achieving their policy goals. As for this research, it is the implementation of the Village Family Planning policy in Tasikmalaya Regency. The purpose of this study is to analyze in depth the inhibiting and supporting factors in achieving the success of the implementation of the Family Planning Village program in Tasikmalaya Regency. The research methodology used is qualitative research, with the aim of analyzing the social phenomena that occur in the implementation of the policy on Family Planning Village in Tasikmalaya Regency. Sources of data were obtained by conducting interviews with officials and people who were directly or indirectly involved in the implementation of the Family Planning Village program. Based on the results of this

---

study, it shows that the implementation of the Village Family Planning policy by the Tasikmalaya District Health and Population Control Office has not been able to achieve the goal. Inhibiting factors in achieving the success of the Family Planning Village program in Tasikmalaya Regency include the lack of family and community participation, as well as support for infrastructure and adequate budget to carry out various programs contained in the Family Planning Village.

---

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk masih terjadi setiap tahun di Indonesia, hal tersebut berbanding terbalik dengan negara-negara maju yang justru jumlah penduduk aslinya berkurang, dimana diproyeksikan jumlah penduduk Indonesia tahun 2020 menurut Badan Pusat Statistik mencapai 271 juta jiwa. Pemerintah telah berupaya melakukan berbagai program dalam pengendalian pertumbuhan penduduk, agar tidak terjadi pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Saat ini telah tumbuh kembang program Kampung KB di seluruh nusantara, semenjak dideklarasikan oleh Presiden RI tahun 2016.

Perkembangan Kampung KB sampai saat ini telah berkembang cukup pesat, tercatat sampai tahun 2020 ini sebanyak 7.726 Kampung KB di seluruh Indonesia. Adapun yang menjadi dasar dari adanya program Kampung KB, yaitu UU Nomor 52 tahun 2009, mengenai Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Penyelenggaraan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana yang dicanangkan merupakan tugas dari BKKBN, yang tidak saja memiliki tugas pokok dalam Pengendalian Kependudukan, tetapi juga mengenai pembangunan keluarga dalam masyarakat sendiri.

Sebagai upaya penguatan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana, BKKBN harus mampu melaksanakan penyusunan kegiatan secara nyata untuk memperkuat pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana ketentuan yang berlaku. Sebagai jawaban atas masalah dalam penanggulangan penduduk dan program pembangunan keluarga, maka terbentuklah yang namanya program Kampung KB, sebagai salah satu solusi, dan diharapkan dalam pelaksanaannya melalui program Bangga Kencana maka program pembangunan lainnya dapat berjalan secara terintegrasi dan simultan.

Program pembangunan yang saat ini sedang dilaksanakan, yaitu pembangunan yang diawali dari pinggiran sebagai upaya memperkuat kampung dan desa sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Kemajuan sebuah kampung akan berdampak terhadap kemajuan sebuah desanya, sehingga cukup beralasan pelaksanaan pembangunan memulainya dari pinggiran atau kampung yang tesebesar diseluruh pelosok negeri. Kemajuan semua desa, tentu akan berdampak terhadap kemajuan bangsa, sehingga saat ini pembangunan desa juga secara terus menerus menjadi perhatian melalui program dana desanya.

Pembentukan Kampung KB terus berlanjut yang pada prinsipnya hingga saat ini sebagai bentuk sinergis antara instansi terkait, mulai dari pusat hingga daerah, mitra dan pihak berkepentingan lainnya, serta sebagai partisipasi masyarakat secara langsung. Program Kampung KB merupakan miniatur atau gambaran kehidupan desa tentang keterpaduan pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan lingkungan, sekaligus bersinergi dengan program pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.

Keberadaan Kampung KB kini dimanfaatkan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, dengan berbagai program untuk mengubah sikap, perilaku dan cara berpikir masyarakat, memajukan desa yang tadinya tertinggal bisa disamakan dengan desa yang lebih maju. Program Kampung KB di Kabupaten Tasikmalaya menjadi tugas dan kewenangan BKKBN yang bersinergi dengan Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk. Dari data yang diperoleh, Kampung KB yang ada di Kabupaten Tasikmalaya berjumlah 384 Kampung KB, dengan klasifikasi Dasar sebanyak 373 Kampung KB, dalam kategori Berkembang sebanyak 11 Kampung KB. Berdasarkan data perkembangan program Kampung KB di Kabupaten Tasikmalaya di atas, menunjukkan perkembangan Kampung KB mencapai tujuan sesuai dengan tujuan kebijakan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Secara etimologis, kebijakan yang berakar dari kata bijak itu memiliki makna yang cenderung positif, sehingga tidak ada kebijakan yang dimaksudkan untuk membawa sesuatu yang negatif, meskipun dalam praktiknya bisa saja demikian. Makna kebijakan bukan hanya domain organisasi publik, tetapi juga organisasi privat, baik formal atau non formal, bahkan individual. Misalnya ketika ada seseorang yang secara pribadi dianggap memiliki karisma atau pengetahuan yang mumpuni kemudian dimintai kebijaksanaan atau juga kebijakan . untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi atau terkait dengan yang meminta kebijakan atau kebijaksanaan tersebut (Rusli, 2015, hal. 31).

Setiap kebijakan yang dibuat, tentu memiliki tujuan yang harus dicapai, sehingga tanpa adanya implementasi, tujuan kebijakan tidak mungkin diwujudkan sesuai dengan tujuan kebijakan. Pengertian lain tentang implementasi kebijakan dikemukakan oleh Metter dan Horn (Agustino, 2008, hal. 195), menyatakan: "Implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu/penjabat, pemerintah atau swasta untuk mencapai tujuan yang dituangkan dalam keputusan kebijakan". Dari pernyataan di atas, implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau pejabat Pemerintah maupun swasta dalam upaya mencapai suatu tujuan kebijakan.

Pengertian lain tentang kebijakan dikemukakan Hasswell dan Kaplan (Rusli, 2015, hal. 33) dengan menyatakan "Kebijakan merupakan salah satu program dalam pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan praktek-praktek yang terarah". Menurut pernyataan tersebut menunjukkan kebijakan seebagai kumpulan dari beberapa instruksi yang secara terstruktur dan terarah dalam mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Pencapaian tujuan kebijakan diperlukan adanya cara-cara atau langkah-langkah agar tujuan yang dikehendaki dapat tercapai secara efisien dan efektif.

Kebijakan secara umum merupakan keputusan-keputusan yang dibuat oleh pejabat, atau pemerintah sehingga (Santosa, 2009, hal. 5) mengungkapkan bahwa: “Kebijakan pemerintah mencakup serangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri untuk mencapai tujuan tertentu, dan langkah-langkah tertentu yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut, terutama dalam bentuk undang-undang atau keputusan pemerintah”.

Diperlukan adanya strategi dalam melaksanakan kebijakan. Strategi dimaksudkan untuk lebih mempercepat pencapaian tujuan kebijakan dengan menggunakan sumber-sumber yang dimilikinya. Pendapat di atas konsisten dengan pendapat yang diutarakan oleh para ahli kebijakan lainnya, (Suryaningrat, 1992, hal. 102) dengan menyatakan bahwa : “Penerapan suatu kebijakan merupakan upaya menggapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan menggunakan cara sesuai urutan waktu tertentu. Realisasi kebijakan juga dapat di ekspresikan sebagai penggunaan sarana untuk mewujudkan keinginan yang telah di tentukan sebelumnya”.

Kebijakan muncul sebagai upaya untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi, baik dalam kelompok, organisasi maupun dalam Pemerintahan, untuk dapat dicarikan solusi dan pemecahannya. Kebijakan umumnya timbul dikarenakan adanya kebutuhan dan tuntutan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau persoalan-persoalan yang harus segera diselesaikan dalam waktu tertentu.

Kebijakan dapat berupa program kegiatan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi, baik bersifat private maupun publik, dan umumnya suatu kebijakan memiliki manfaat yang luas dengan tujuan yang telah ditentukan. Kebijakan dapat juga dilihat sebagai program yang telah dipilih oleh seseorang atau kelompok maupun organisasi private maupun publik yang memiliki pengaruh terhadap orang-orang dalam usaha mencapai tujuan tertentu. Kebijakan diambil untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh orang, kelompok maupun organisasi swasta maupun pemerintah. Kebijakan merupakan suatu pilihan untuk menyelesaikan berbagai persoalan dengan menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Telah banyak pendapat ahli yang mengemukakan tentang model-model dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Model implementasi kebijakan menurut Gridle (Kusnandar, 2012, hal. 110–111) keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi kebijakan. Setiap model kebijakan memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga tidak ada satu model implementasi kebijakan yang benar-benar dapat memberikan jaminan sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Pengertian metode kualitatif (Creswell, 2014, hal. 4) mengutarakan: “Metode kualitatif adalah metode untuk menggali dan menegerti arti perorangan atau anggota tertentu yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan”

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kampung KB dibentuk untuk mewujudkan dan melaksanakan delapan fungsi keluarga di seluruh masyarakat, dimana Pemerintah telah membentuk dan menghidupkan kembali program KKBPK untuk mengakses layanan bagi keluarga dan masyarakat. Hal tersebut didesain sebagai upaya revitalisasi dalam kegiatan yang dilakukan di Kampung KB, dimana tidak hanya identik dengan penggunaan dan pemasangan alat kontrasepsi, tetapi juga program pembangunan yang terintegrasi dengan berbagai program pembangunan lainnya. Kampung KB merupakan sarana pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program untuk meningkatkan sikap, perilaku dan cara berpikir masyarakat. Hal ini memungkinkan desa yang sebelumnya tertinggal menjadi setara dengan desa lainnya. Masyarakat yang sebelumnya tidak aktif dapat bergabung dengan Poktan yang sudah ada, dan keluarga yang tidak memiliki penghasilan dapat bergabung sebagai anggota UPPKS yang sudah ada.

Berkaitan dengan program Keluarga Berencana, berdasarkan data di lapangan, periode Januari sampai dengan Oktober 2020, terdapat data-data pasangan usia subur dan peseta KB Aktif di Kabupaten Tasikmalaya, yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1  
Pasangan Usia Subur (PUS) dan Unmet Need  
Bulan Januari – Oktober 2020

No	Bulan	PUS	TIDAK BER- KB					Unmet Need		PA	CU/PUS
			Hamil	IAS	IAT	TIAL	Total	IAT +TIAL	%		
1	Januari	360.571	17.008	48.339	23.308	20.741	109.396	44.049	12,22%	252.124	69,92%
2	Februari	349.766	16.774	43.385	22.541	21.114	103.814	43.655	12,48%	245.952	70,32%
3	Maret	372.539	16.980	43.023	22.545	22.800	105.348	45.345	12,17%	267.191	71,72%
4	April	356.194	16.831	42.055	22.410	22.539	103.835	44.949	12,62%	252.359	70,85%
5	Mei	359.727	17.245	44.052	21.817	21.518	104.632	43.335	12,05%	255.095	70,91%
6	Juni	358.613	17.606	43.265	21.897	20.707	103.475	42.604	11,88%	255.138	71,15%
7	Juli	352.961	17.122	42.497	21.393	20.895	101.907	42.288	11,98%	251.054	71,13%
8	Agustus	348.751	17.091	42.643	21.805	20.961	102.500	42.766	12,26%	249.835	71,64%
9	September	351.088	17.148	41.893	21.951	22.336	103.328	44.287	12,61%	247.760	70,57%
10	Oktober	355.417	17.298	41.016	21.997	22.945	103.256	44.942	12,64%	252.161	70,95%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, 2020.

Unmet need KB merupakan kelompok wanita yang sudah tidak ingin mempunyai anak lagi atau ingin menjarangkan kehamilannya sampai dengan 24 bulan namun tidak menggunakan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilannya. Unmet need KB merupakan permasalahan yang bersifat multidimensional karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berdasarkan data di atas menunjukkan kelompok usia subur yang masuk dalam kategori Unmet Need masih cukup besar, hal tersebut menunjukkan peran Kampung KB belum berjalan dengan baik dalam mencapai tujuannya salah satunya dalam memberikan edukasi pentingnya masuk dalam program KB.

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan program Kampung KB di Kabupaten Tasikmalaya dengan jumlah 384 Kampung KB, masuk dalam klasifikasi Dasar sebanyak 373 Kampung KB, kategori Berkembang sebanyak 11 Kampung KB. Dari temuan tersebut menunjukkan masih banyak Kampung KB yang keberadaannya belum meningkatkan

perannya, hanya sebatas nama masuk dalam program Kampung KB. Dipertegas kembali dari data yang diperoleh peserta KB aktif di Kabupaten Tasikmalaya periode bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2020 dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini :

Tabel 2  
Peserta KB Aktif  
Periode Bulan Januari – Oktober 2020

No.	Bulan	MIX KONTRASESPI							JUMLAH
		IUD	MOW	MOP	KOND	IMP	SUNTIK	PIL	
1	Januari	26.875	5.185	893	2.066	16.526	155.189	45.390	252.124
2	Februari	22.942	5.063	791	2.009	17.300	158.019	39.828	245.952
3	Maret	22.411	5.143	803	2.059	16.733	159.260	60.782	267.191
4	April	22.172	5.376	770	2.058	17.129	159.887	44.967	252.359
5	Mei	28.978	5.076	769	2.131	16.733	160.086	41.322	255.095
6	Juni	29.765	5.038	794	2.026	17.185	158.668	41.662	255.138
7	Juli	22.451	5.057	765	2.084	17.129	161.897	41.671	251.054
8	Agustus	22.042	5.043	751	2.068	16.986	162.137	40.808	249.835
9	September	22.766	5.061	810	2.056	17.507	159.099	40.461	247.760
10	Oktober	24.704	5.152	760	2.548	17.290	161.521	40.186	252.161

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, 2020.

Kampung KB bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan, sehingga kegiatan intervensi di Desa KB perlu disesuaikan dengan konteks masyarakat dan juga membutuhkan data (baseline data) sebagai dasar perencanaan dan pembuatan kegiatan. Diperlukan adanya usaha untuk secara berkelanjutan dalam memperluas dukungan untuk berbagai desa. Kegiatan yang dilakukan antara lain penyusunan pedoman pengelolaan Kampung KB, penguatan kapasitas, penyusunan rencana kerja Kampung KB, wilayah dan desa yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, berbatas waktu (SMART). Kampung KB bertujuan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan secara sistematis guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat desa dan merasakan manfaat pembangunan.

Kebijakan tentang Kampung KB di Kabupaten Tasikmalaya, dari hasil penelitian menunjukkan pada umumnya masyarakat telah mengetahui tentang manfaat yang diperoleh dengan adanya Program Kampung KB, dimana dapat dilihat dari jumlah pendirian Kampung KB yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Namun demikian secara kuantitas menunjukkan semangat yang tinggi dalam mendirikan Kampung KB, tetapi dalam pengelolaannya masih kurang, sehingga hanya sedikit sekali Kampung KB yang berkembang dengan baik.

Tujuan dari adanya Kampung KB tentu memberi harapan kepada keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik, namun demikian dari beberapa capaian seperti tingkat kepesertaan KB juga belum mencapai target yang telah ditentukan. Masih diperlukan pendekatan-pendekatan budaya melalui tokoh masyarakat, tokoh keagamaan maupun dengan para pengurus di tingkat RT dan RW, agar

masyarakat dapat terlibat secara langsung dengan program Kampung KB, sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi keluarga dan lingkungan masyarakatnya.

Sejalan dengan yang disampaikan di muka, perubahan yang diharapkan dengan adanya program Kampung KB di Kabupaten Tasikmalaya belum begitu memberikan dampak yang signifikan. Masyarakat kurang antusias dalam melibatkan diri dalam program-program yang diselenggarakan oleh Kampung KB, sehingga dalam perjalanannya, pelaksanaan dan pengelolaan Kampung KB kurang berjalan dengan baik, dan secara otomatis kurang memberikan dampak kepada keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Kebijakan terkait dengan Kampung KB, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu melalui berbagai pemberdayaan maka akan dapat meningkatkan kehidupan keluarganya. Dari hasil penelitian ini menunjukkan dari aspek ekonomi, kualitas sumber daya manusia belum berdampak signifikan, terlebih dari kemauan masyarakat dalam keterlibatan KB, dimana dari hasil penelitian ini belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Keberadaan program Kampung KB di Kabupaten Tasikmalaya sebenarnya sangat baik dalam upaya mendukung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena Kampung KB tidak saja terkait dengan masalah-masalah lonjakan penduduk maupun penggunaan alat-alat kontrasepsi, tetapi lebih kepada bagaimana agar terciptanya keluarga kecil dan bahagia terwujud melalui beberapa program yang dilaksanakan dalam Kampung KB. Setiap keluarga dan masyarakat perlu lebih memahami tentang maksud dan tujuan dari adanya program Kampung KB, sehingga dengan lebih mengetahui dan memahaminya dapat secara aktif tergabung dalam Kampung KB yang ada di wilayahnya.

Dalam setiap kebijakan tentu ada perumus kebijakan, pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan serta sasaran kebijakannya. Pelaksana kebijakan terkait Program Kampung KB di Kabupaten Tasikmalaya telah adanya keterlibatan lintas sektor, meskipun program Kampung KB merupakan kewenangan dari BKBBN, tetapi dalam pelaksanaannya telah melibatkan berbagai instansi terkait seperti Dinas Kesehatan melalui Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sampai dengan pengurus Kampung KB sendiri.

Melihat sumberdaya yang dimiliki dalam pelaksanaan Program Kampung KB sebenarnya cukup tersedia, namun demikian sumber daya manusia, dalam hal ini di tingkat terkecil, yaitu keluarga dan lingkungan masyarakatnya yang masih kurang, sehingga program Kampung KB sebagian besar belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sementara dari aspek sarana dan prasarana masih perlu mendapatkan perhatian dari pemangku kebijakan ditambah dengan ketersediaan anggaran untuk mendukung operasionalisasi program-program yang ada di Kampung KB.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui Dinas Kesehatan yang secara khusus memiliki kewenangan dalam program kependudukan dan keluarga berencana, melalui Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah melakukan advokasi,

sosialisasi dan pembinaan terhadap keluarga, masyarakat dan pengurus Kampung KB agar mampu mengembangkan program-program yang dan termuat dalam program Kampung KB agar dapat memberikan manfaat pada keluarga dan lingkungan masyarakat. Strategi yang telah dilaksanakannya melalui workshop, pertemuan-pertemuan secara langsung kepada masyarakat maupun dengan sosialisasi dengan melibatkan berbagai komponen didalamnya.

Kunci keberhasilan pelaksanaan program Kampung KB di Kabupaten Tasikmalaya ditentukan oleh sejauhmana minat dan kemauan dari kelompok sasaran, dalam hal ini keluarga dan lingkungan masyarakatnya. Dari hasil penelitian ini menunjukkan partisipasi masyarakat masih kurang, meskipun secara kuantitatif jumlah Kampung KB banyak berdiri, tetapi hanya sedikit Kampung KB yang berkembang dan mampu memberikan manfaat bagi anggotanya. Diperlukan adanya upaya-upaya untuk lebih mendorong keluarga atau masyarakat untuk lebih aktif dan terlibat secara langsung dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program Kampung KB, agar tujuan terwujudnya masyarakat yang sejahtera dapat tercapai.

Masyarakat pada umumnya telah memahami manfaat terhadap adanya program Kampung KB sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung yang merupakan wilayah terkecil dalam pemerintahan desa. Kampung KB tidak saja sebagai upaya pengendalian penduduk dan masalah-masalah reproduksi keluarga, tetapi lebih kepada meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perkonomian. Stabilisasi dan peningkatan ekonomi keluarga tidak harus selalu berpenghasilan tinggi, tetapi keseimbangan antara pengeluaran yang tidak melebihi pendapatan, menggali sumber daya ekonomi baik bagi individu, keluarga maupun kelompok masyarakat, serta mengurangi beban ketergantungan.

Kebijakan program Kampung KB dari temuan secara umum menunjukkan bahwa masyarakat mengetahui manfaat program Kampung KB, terlihat dari banyak berdirinya Kampung KB di Kabupaten Tasikmalaya, tetapi kekurangan dalam hal pengelolaannya. Hal tersebut berkaitan dengan tingkat partisipasi dalam keluarga sehingga diperlukan adanya pendekatan budaya melalui tokoh masyarakat, tokoh agama, pengurus tingkat RT dan RW agar masyarakat dapat terlibat langsung dalam program Kampung KB, yang dapat membawa manfaat nyata bagi keluarga dan masyarakat.

Dari aspek perubahan yang diharapkan pada program Kampung KB di Kabupaten Tasikmalaya ternyata belum berdampak signifikan, dikarenakan masyarakat kurang aktif mengikuti program-program yang disponsori Kampung KB. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa adanya Kampung KB belum memberikan pengaruh yang signifikan secara ekonomi, serta kemauan masyarakat untuk ber-KB dimana hasil penelitian ini belum sesuai dengan yang diharapkan.

Kehadiran program Kampung KB di Kabupaten Tasikmalaya sebenarnya sangat baik dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. KampungKB merupakan program yang dilaksanakan di beberapa KampungKB sekaligus masalah pertumbuhan



penduduk dan penggunaan alat kontrasepsi. Seluruh keluarga dan masyarakat perlu lebih memahami maksud dan tujuan program Kampung KB.

Pelaksanaan kebijakan terkait program Kampung KB di Kabupaten Tasikmalaya yang berada di bawah kewenangan BKBBN dan telah dilaksanakan melalui keterlibatan lintas sektoral, untuk Dinas Kesehatan merupakan tugas dari Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana. Selanjutnya dari aspek sumber daya yang dimiliki oleh pelaksanaan program Kampung KB sebenarnya cukup tersedia, namun dalam hal ini program Kampung KB kurang berjalan dikarenakan faktor keluarga dan lingkungan masyarakat yang kurang berperan aktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah Kampung KB secara kuantitatif banyak berdiri, partisipasi masyarakat masih kurang, masih angat sedikit yang benar-benar berjalan dengan cukup baik. Diperlukan upaya untuk lebih mendorong keluarga dan masyarakat agar lebih aktif dan terlibat langsung dalam kegiatan yang dilaksanakan di bawah program Kampung KB agar tujuan kebijakan dapat tercapai.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan implementasi kebijakan Kampung KB oleh Dinas Kesehatan dan Kependudukan Kabupaten Tasikmalaya belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan. Kurangnya partisipasi keluarga dan masyarakat, sarana prasarana dan dukungan anggaran yang memadai untuk melaksanakan berbagai program yang termasuk dalam program Kampung KB menjadi kendala dan hambatan dalam pencapaian keberhasilan program Kampung KB di Kabupaten Tasikmalaya

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Pustaka Pelajar.
- Kusnandar, I. (2012). *Analisis Kebijakan Publik*. Multazam.
- Rusli, B. (2015). *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Hakim Publishing.
- Santosa, P. (2009). *Administrasi Publik*. Refika Aditama.
- Suryaningrat, B. (1992). *Pemerintah Administrasi Desa dan Kelurahan*. Rineka Cipta.